

DAMPAK PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP EKONOMI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

(Studi Kasus di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Yana Seftiyana (Mahasiswa)¹⁾, Ria Angin (Dosen Pembimbing)²⁾

1. Universitas Muhammadiyah Jember, Yanaseftiyana123@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Jember, ria.angin@unmuhjember.ac.id

ABSTRACT

Various policies were taken by the government to overcome the COVID-19 pandemic in Indonesia. On the one hand, the Policy for the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) can suppress the spread of the Covid-19 virus in Indonesia, but on the other hand there is a very large impact on the community's economy. The groups most affected by the PPKM policy of up to four levels are the lower middle class, namely Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze and determine the impact of the PPKM policy on the economy of micro business actors in Ledokombo District. The research method uses a qualitative descriptive approach with literature study and environmental observation methods. The results of this study indicate that the impact of PPKM on the economy of MSME actors is experiencing a decrease in income. Many micro-enterprises have temporarily closed their production and some have migrated to the city for other work. The impact felt by business actors is a decline in sales; often out of stock due to late logistics delivery due to the many barriers on the road; have to temporarily close their business or permanently close their business because the business is not running at all; restrictions on trading time for street vendors, grocery stores, eating and drinking businesses; business people must stay or change products.

Keywords: policy, PPKM, MSMEs

ABSTRAK

Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada satu sisi dapat menekan laju penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, namun di sisi lain terdapat dampak yang sangat besar bagi ekonomi masyarakat. Kelompok yang sangat terdampak adanya kebijakan PPKM hingga empat level ini ialah masyarakat menengah ke bawah yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis dan mengetahui dampak adanya kebijakan PPKM terhadap ekonomi pelaku usaha mikro di Kecamatan Ledokombo. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur dan observasi lingkungan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari PPKM terhadap ekonomi pelaku UMKM yaitu mengalami penurunan pendapatan. Pelaku usaha mikro banyak yang menutup sementara produksinya serta sebagian lain ada yang merantau ke kota untuk kerja lainnya. Dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha ialah mengalami penurunan penjualan; sering kehabisan stok karena pengiriman logistik yang telat akibat banyaknya penyekatan di

jalan; harus menutup usahanya sementara waktu atau tutup permanen karena tidak berjalannya usaha sama sekali; pembatasan waktu berdagang bagi pedagang kaki lima, toko kelontong, usaha makan minuman; para pelaku bisnis harus bertahan atau ganti produk.

Kata Kunci: Kebijakan, PPKM, UMKM

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 di Indonesia ditetapkan sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020. Hingga saat ini di penghujung tahun 2021 memasuki tahun 2022 pandemi Covid-19 belum saja berakhir di Indonesia. Kasus virus covid-19 diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO) pada akhir bulan Desember tahun 2019 yang menyebutkan bahwa adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini akhirnya mulai berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia adalah coronavirus.

Untuk mengatasi dan menekan laju penyebaran virus Covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan aturan hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dijelaskan pada Pasal 4 Ayat (1) bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, 2020).

Selama masa diberlakukannya kebijakan PSBB, mobilitas masyarakat dibatasi dalam skala besar seperti adanya kebijakan *Work From Home* (WFH) bekerja dari rumah, *Physical Distancing* menjaga jarak, sekolah dan belajar secara daring, penutupan pertokoan non makanan, dan lainnya segala upaya telah dilakukan hingga memasuki masa new normal. Masa new normal masyarakat dituntut memiliki kehidupan dan kebiasaan baru yaitu hidup berdampingan dengan virus covid-19. Seiring berjalannya waktu dengan kondisi

negara Indonesia yang belum berakhir pandemi covid-19, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik darurat hingga menerapkan level PPKM di setiap daerah sesuai dengan perkembangan virus Covid-19.

Salah satu dampak yang sangat dirasakan dari adanya kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan di Indonesia ialah penurunan ekonomi masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha mikro. Banyak pelaku usaha mikro yang mengalami kerugian dan penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Ditambah lagi dengan kebijakan PPKM yang terus diperpanjang membuat para pelaku usaha mikro atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami kesulitan akibat pendapatan yang berkurang karena penjualan yang menurun. Mulai dari pelaku usaha mikro sektor industri, makanan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga jasa.

Akibat pandemi Covid-19, PDRB Kabupaten Jember mengalami penurunan sebesar Rp. 1.185,73 milyar. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan perekonomian Kabupaten Jember pada tahun 2020 mengalami penciutan pertumbuhan yaitu -2,98 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 yaitu tumbuh sebesar 5,51 persen. Penyumbang ekonomi Kabupaten Jember masih didominasi oleh kategori bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,91 persen. Disusul kategori industri pengolahan sebesar 19,87 persen dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,78 persen (Anonim, 2021).

Usaha Mikro menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jember. Berdasarkan data BPS Kecamatan Ledokombo Dalam Angka 2021, Kecamatan Ledokombo memiliki jumlah wiraswasta atau *entrepreneur* sebanyak 7.742 penduduk dan perdagangan sebanyak 872 penduduk. Dengan kebanyakan usaha yang dimiliki seperti warung/ kedai makanan sebanyak 28 penduduk dan toko/warung kelontong sebanyak 1.729 penduduk.

Banyak pelaku usaha mikro seperti pemilik warung, toko kelontong, penjual kantin sekolah, industri rumahan, maupun UMKM mengeluh dengan penurunan

pendapatan selama masa pandemi Covid-19. Sehingga, untuk tetap bertahan hidup, masyarakat harus memutar otak untuk terus mendapatkan penghasilan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Jember telah memberikan bantuan kepada UMKM dengan mengadakan pelatihan dan edukasi dengan mendatangkan tenaga ahli. Namun, kebijakan PPKM yang diberlakukan juga berdampak terhadap penjualan usaha dari para pelaku usaha mikro kecil menengah.

Selama PPKM Darurat yang diberlakukan, para pelaku usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Ledokombo mengalami kesulitan berjualan karena adanya berbagai pembatasan. Sehingga saat diberlakukan PPKM level 3, seperti mendapat berita angin segar bagi UMKM terutama usaha makanan dan minuman diperbolehkan buka sampai pukul 21.00 WIB. Sedangkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di bidang industri rumahan seperti manik-manik, batik, dan lainnya masih mengalami kesulitan penjualan. Yang biasanya banyak pengunjung datang dari luar daerah maupun mancanegara untuk mengunjungi Tanoker saat festival, di masa pandemi Covid-19 festival Egrang Tanoker ditiadakan. Banyak usaha mikro rumahan bidang industri maupun tekstil menitipkan barangnya di Tanoker untuk dibantu dalam hal pemasaran. Selama pandemi dan diberlakukan PPKM, para pelaku usaha mikro tersebut mengalami kesulitan penjualan, karena keterbatasan penerimaan hasil produksi di Tanoker.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saja dampak yang dirasakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah. Dan juga untuk mengetahui bagaimana dampak adanya kebijakan PPKM pada ekonomi UMKM. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan akibat adanya PPKM bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dengan judul “Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian berlokasi di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember pada tahun 2021. Peneliti mengumpulkan dan mengidentifikasi apa saja dampak yang dirasakan oleh Pelaku Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (UMKM) karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan bagaimana dampak pada ekonomi pelaku UMKM tersebut. Sumber data berasal dari data sekunder melalui data Badan Pusat Statistik Jember dan beberapa penelitian sebelumnya. Data primer didapatkan melalui proses wawancara 5 pelaku UMKM dan observasi lingkungan selama Magang di Kantor Kecamatan Ledokombo. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

STUDI KEPUSTAKAAN

Penelitian dari Anililiya Aifatul Khusna dan Mellynia Ika Damayanti dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Jombang”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan PDRB Kabupaten Jombang minus 1,98 persen. Sedangkan, di sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang notabeneanya bergerak dalam bidang UMKM menurun menjaddi Rp. 4.062, 55 miliar rupia akibat pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi UMKM di Kabupaten Jombang dan dampak bagi pelaku usahha mikro di sisi pendapatan selama pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 2 pelaku usaha yang dijalankan mengalami kenaikan permintaan dan banyak dibutuhkan di masa pandemi. Sedangkan, sebanyak 13 pelaku usaha mikro dengan mayoritas jenis usaha di bidang makanan atau minuman mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan jenis usaha yang dijalankan mengalami penurunan. Faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya penjualan yang berdampak pada pendapatan pelaku usaha mikro yaitu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), bantuan atau insenti dari pemerintah daerah, dan lambatnya

pendistribusian barang. Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas dampak suatu kondisi terhadap UMKM. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 terhadap pelaku Usaha Mikro secara spesifik, yaitu di Kabupaten Jombang. Penelitian sekarang membahas tentang dampak kebijakan PPKM terhadap ekonomi pelaku UMKM yang secara spesifik di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

Penelitian dari Muhammad Rizal, Ria Afrianti, dan Imam Abdurrahman yang berjudul “Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis *Cofe shop* pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta”. Dalam penelitian ini ditujukan untuk meneliti dampak kebijakann pembatasan kegiatan pada era pandemik COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan pelaku bisnis *coffe shop* terdampak dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, terlihat dengan berkurangnya omset penjualan, distribusi bahan baku kopi yang terlambat, dan beralihnya perilaku B2B bergeser ke *business to customer* dengan meningkatkan konversi dalam *digital marketing*. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti dampak PPKM terhadap pelaku bisnis. Perbedaannya, pada peelitian ini ditekankan pada analisis dampak Covid-19 terhadap UKM sektor *coffe shop* di Purakarta setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhadap ekonomi di berbagai pelaku usaha di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Katadata, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bersama dengan Indoset menghasilkan data sebanyak 24 persen (%) UMKM memutuskan menutup usahanya untuk sementara. Sedangkan sebanyak 30,9 persen (%) UMKM harus menutup usahanya secara permanen. Survey dilakukan kepada 3011 UMKM yang terdampak adanya PPKM Darurat yang kemudian berganti nama menjadi PPKM

Level 4. PPKM Darurat berlaku di Indonesia sejak 3 Juli 2021 sebagai akibat dari melonjaknya kasus Covid-19. Kebijakan PPKM ini memiliki dampak besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Norimasa Shimomura sebagai Kepala Perwakilan UNDP untuk Indonesia mengatakan bahwa sebanyak 90% UMKM mengalami penyusutan pendapatan (Maesaroh, 2021).

Berdasarkan sajian data dari website resmi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang memiliki UMKM paling banyak di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari sumber Sensus Ekonomi 2016 dan SUTAS 2018, Kabupaten Jember memiliki UMKM sebanyak 647.416 pelaku usaha. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jember, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2018 mencapai 5,02 persen. Kemudian pada tahun 2019 mencapai 5,51 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB Jember mengalami penurunan yaitu -2,98 persen. Penurunan disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan serangkaian kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak pada perekonomian.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2018 sebesar 5,23 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,03 persen. Disusul kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,42 persen. Selanjutnya kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 8,13 persen (BPS Kabupaten Jember). Dapat dilihat bahwa usaha kecil, mikro, dan menengah tetap menjadi penyumbang yang cukup besar bagi PDRB.

Dalam buku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (2012) dalam (Aniliya Khusna, 2021, hal. 119) menyebutkan mengapa UMKM penting bagi negara Indonesia yaitu, *pertama* banyaknya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama Usaha Mikro yang ada di pedesaan atau daerah terpencil dapat menimbulkan dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut. *Kedua*, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu jenis dari kegiatan padat karya yang dapat memberikan dampak bagi lapangan pekerjaan

masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. *Ketiga*, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan stabilitas bagi UMKM lainnya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Di Kecamatan Ledokombo Tahun 2020

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/ Pekebun	17.493
2.	Belum/ Tidak Bekerja	17.203
3.	Wiraswasta	7.742
4.	Pelajar	7.842
5.	Mengurus Rumah Tangga	10.582
6.	Buruh Tani	5.555
7.	Karyawan Swasta	316
8.	Perdagangan	872
9.	Buruh Harian	295
10.	PNS	245
11.	Nelayan	12

Sumber: Data BPS Kabupaten Jember

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk menurut pekerjaan berdasarkan hasil sensus tahun 2020 paling tinggi ditempati oleh petani/pekebun yaitu sebanyak 17.493 penduduk. Untuk wiraswasta sebanyak 7.742 penduduk dan yang bekerja di bidang perdagangan sebanyak 872 penduduk (BPS Kabupaten Jember, 2021). Jadi, total keseluruhan berdasarkan data dari BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Ledokombo memiliki sebanyak 8.614 penduduk yang menjadi pelaku usaha baik mikro, kecil, maupun menengah. Pelaku UMKM paling banyak ialah pemilik toko kelontong dan usaha makan minuman. Sebagian pelaku UMKM berwirausaha pada bidang pakaian, industri, dan kerajinan tangan serta batik.

Dampak Kebijakan PPKM Terhadap UMKM

Akhir Juni 2021 Indonesia mengalami lonjakan kasus penderita Covid-19 di berbagai daerah. Adanya varian Delta dari India yang masuk ke Indonesia menambah kasus penduduk yang terkena Covid-19. Sehingga Kebijakan PPKM diambil oleh pemerintah untuk menekan laju penularann kasus Covid-19 tersebut. Pemerintah menetapkan PPKM Darurat Skala Mikro pada awal Juli 2021.

Kebijakan PPKM memiliki dua dampak yang jelas. Dampak pertama ialah dapat menekan laju penyebaran virus dan menurunya kasus penderita Covid-19. Di sisi lain, kebijakan PPKM sangat berdampak pada perekonomian Indonesia yang sangat dirasakan oleh pelaku usaha mikro.

Adapun dampak yang dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat diberlakukannya kebijakan PPKM saat kondisi darurat Covid-19 ialah mengalami penurunan penjualan; sering kehabisan stok karena pengiriman logistik yang telat akibat banyaknya penyekatan di jalanan; harus menutup usahanya sementara waktu atau tutup permanen karena tidak berjalannya usaha sama sekali; pembatasan waktu berdagang bagi pedagang kaki lima, toko kelontong, usaha makan minuman; para pelaku bisnis harus bertahan atau ganti produk.

Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Ledokombo

Selama pandemi Covid-19, para pelaku usaha atau bisnis harus bertahan di tengah situasi yang sulit akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat itu. Pelaku usaha banyak yang menutup usaha atau dagangannya karena pembatasan sosial. Kecamatan Ledokombo memiliki berbagai UMKM, salah satu UMKM yang terkenal di Kecamatan Ledokombo ialah UMKM Manik-Manik di Desa Sumberlesung, UMKM Manik-Manik di Desa Slateng, UMKM Sandal Bakiak di Desa Sukogidri, dan UMKM Batik di Desa Slateng.

Para pelaku bisnis atau usaha harus bertahan di tengah paandemi yang tiada berakhir hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah terus dilakukan untuk memutus rantai penularan virus Covid-19. Mulai dari PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM dengan empat level. Adanya kebijakan PPKM yang terus diperpanjang setiap minggunya, sangat berdampak pada ekonomi pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, maupun menengah. Dampak ekonomi yang sangat dirasakan ialah menurunnya omset atau pendapatan, pemasukan yang kurang tetapi harus

tetap memproduksi sehingga membutuhkan modal dan modal tidak sebanding dengan pemasukan, penjualan yang susah karena masyarakat lain pun bertahan di tengah kondisi pandemi.

Dari 5 informan yang diwawancarai, mereka menyebutkan bahwa hal tersulit yang dihadapi ialah pemasaran. Saat PPKM masih terus diberlakukan, pemasaran atau penjual sangat menurun. Salah satunya ialah Muhammad Khotib pengrajin batik tulis khas Ledokombo yang ada di desa Slateng, beliau mengungkapkan kesulitan untuk penjualan. Kesulitan yang dirasakan ialah sepi nya minat pembeli. Hal tersebut sangat berdampak pada ekonomi atau rumah tangga usaha batiknya. Begitupun yang dirasakan oleh UMKM manik-manik di Desa Sumberbulus dan Desa Slateng, keduanya mengungkapkan bahwa PPKM ini sangat berdampak bagi perekonomian usahanya. Manik-manik yang biasanya dipamerkan pada acara Festival Egrang Ledokombo, sudah tidak lagi ditampilkan karena pembatasan kegiatan masyarakat. Pengrajin Sandal Bakiak di Desa Sukogidri harus merantau kerja ke Bali, karena usahanya yang mengalami kemunduran akibat dampak PPKM. Dan pelaku usaha toko kelontong mengungkapkan seringnya keterlambatan stok barang membuat pembelian pun menjadi menurun, karena apa yang dibutuhkan oleh pembeli tidak tersedia.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa Kabupaten Jember mengalami penurunan PDRB selama pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jember, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2018 mencapai 5,02 persen. Kemudian pada tahun 2019 mencapai 5,51 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB Jember mengalami penurunan yaitu -2,98 persen. Penurunan disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan serangkaian kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak pada perekonomian.

Salah satu penyumbang perekonomian suatu daerah ialah UMKM. Diberlakukannya PPKM sangat berdampak teradap ekonomi UMKM. Dampak

yang terlihat dari adanya kebijakan PPKM bagi pelaku usaha ialah penurunan pendapatan, penjualan atau pemasaran yang sulit, keterlambatan stok barang karena keterlambatan logistik akibat penyekatan, para pelaku usaha harus menutup sementara atau secara permanen usahanya.

Di tengah kondisi seperti itu, para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Ledokombo harus bertahan. Banyak dari pelaku usaha yang memutuskan untuk menjadi buruh tani dan kembali berkebun/bertani. Selain itu sebagian dari pelaku usaha memutuskan untuk kerja dan merantau ke kota untuk menyambung perekonomiannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah memberi nikmat sehat dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan ini. Pertama bersyukur dan terima kasihh kepada diri sendiri, sudah bersedia dan sanggup menyelesaikan penulisan atau penelitian studi literatur ini. Kepada orang tua yang selalu support moril dan materil dalam kehidupan saya. Kepada dosen pembimbing Dra. Ria Angin yang sudah membimbing dalam penelitian ini.

Pihak Kecamatan Ledokombo yang bersedia menjadi lokasi penelitian, para inorman dari pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah yang bersedia saya jadikan sebagai narasumber penelitian. Dan kepada teman-teman yang membantu dalam proses penelitian. Serta Prodi Ilmu Pemerintahan yang sudah menyediakan wadah untuk mengikuti dan diikutkan pada Seminar AIPPTM Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

Aniliya Khusna, M. I. (2021, 10 25). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Jombang. *GEMA EKONOMI (Jurnal Fakultas Ekonomi)*, 10. Retrieved 12 4, 2021, from <http://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/article/view/1453>

- Anonim. (2020, Maret 31). *PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Anonim. (2021). *Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia*. Retrieved from [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia): https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia
- Anonim. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Anonim. (2021, Maret 15). *Pertumbuhan Ekonomi Jember Tahun 2020 Alami Kontraksi*. Retrieved from kominfo.jatimprov.go.id: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pertumbuhan-ekonomi-jember-tahun-2020-alami-kontraksi>
- Anonim. (2021, Februari 9). *PPKM Skala Mikro Mulai Diberlakukan Hari Ini*. Retrieved from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209062529-20-603917/ppkm-skala-mikro-mulai-diberlakukan-hari-ini): <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209062529-20-603917/ppkm-skala-mikro-mulai-diberlakukan-hari-ini>
- Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- BPS Kabupaten Jember. (2021). *Kecamatan Ledokombo Dalam Angka 2021*. Retrieved from [jemberkab.bps.go.id](https://jemberkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/d8cefb3fa7396ca25614a3e7/kecamatan-ledokombo-dalam-angka-2021.html): <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/d8cefb3fa7396ca25614a3e7/kecamatan-ledokombo-dalam-angka-2021.html>
- BPS Kabupaten Jember. (n.d.). *Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2020*. Retrieved from [jemberkab.bps.go.id](https://jemberkab.bps.go.id/indicator/52/33/1/pertumbuhan-ekonomi-menurut-lapangan-usaha-persen-.html): <https://jemberkab.bps.go.id/indicator/52/33/1/pertumbuhan-ekonomi-menurut-lapangan-usaha-persen-.html>
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Proinsi Jawa Timur Tahun 2019. (n.d.). Retrieved from [diskopukm.jatimprov.go.id](http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm): <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>
- Maesaroh. (2021, Oktober 14). *Lebih dari 50% UMKM Tutup Selama PPKM, Bisnis Pakaian Paling Terpukul*. Retrieved Desember 4, 2021, from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/6168152620b1a/lebih-dari-50-umkm-tutup-selama-ppkm-bisnis-pakaian-paling-terpukul>

- Muhammad Dinar, M. H. (2018). *Pengantar Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Makassar: CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu.
- Muhammad Rizal, R. A. (2021). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe Shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Inspirasi*.
- Salbiah, A. N. (2021). *Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu*. Retrieved from eprints.uniska-bjm.ac.id.